



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PULAU
TALIABU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA PALU
TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020

PEMOHON

- Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021)
- Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele (Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Pulau Taliabu
- KPU Kota Palu

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 11.03 – 12.18 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Siska Yosephin Sirait**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hedi Hudaya
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

B. Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/:

1. Arisandi La Isa
2. Rometi Haruna
3. Aksa Puko
4. Buchari Mahmud

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

Hendra Kasim

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

Ramli

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Suherman
2. Hitno Kossi
3. Muh. Sattu Pali
4. Feti Anggraeni Dini

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Irfan Umar
2. Roy Marianto Babutung
3. Helmy
4. Grace Wulan Apriani Tuba

G. Termohon Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agussalim Wahid
2. Nurbia
3. Risvireno
4. Iskandar Lembah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Iskandar
2. Rusmin H. Hamzah

I. Bawaslu:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Mochtar Tidore | (Kab. Pulau Taliabu) |
| 2. Adidas La Tea | (Kab. Pulau Taliabu) |
| 3. Lylia | (Kab. Pulau Taliabu) |
| 4. Fahrul Abdul Muid | (Prov. Maluku Utara) |
| 5. Ivan Yudharta | (Kot. Palu) |
| 6. Fadlan | (Kot. Palu) |
| 7. Munirah | (Kot. Palu) |
| 8. Inong | (Prov. Sulawesi Tenggara) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Sebagaimana pada sidang yang pertama, kita harus berusaha mempersempit atau memperpendek durasi persidangan. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, supaya pokok-pokoknya saja. Dipersingkat, ya? Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya? Semua data, bukti, semuanya ada, sudah disampaikan, sehingga apa yang disampaikan itu pokok-pokoknya saja.

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir, Pemohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Terima kasih, Yang Mulia, yang hadir Hedi Hudaya sama Iqbal Tawakkal Pasaribu.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ROY MARIANTO BABUTUNG

Terima kasih, Yang Mulia, untuk yang luring hari ini yang hadir adalah saya sendiri, Roy Marianto Babutung, S.H., dan Grace Wulan Apriani Tuba, S.H. Sedangkan untuk yang daring dihadiri oleh Muhammad Irfan Umar, S.H., dan Helmy, S.H. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Termohon Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021, Kuasa Hukum Termohon, Yang Mulia, Hendra Kasim. Prinsipal yang hadir di ruang sidang yang mulia ini, Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Arisandi La Isa. Yang mengikut persidangan melalui daring ada Divisi Hukum KPU Kabupaten, Taliabu Pak Rometi, juga Pak Aksa (Divisi Data), dan disaksikan langsung oleh Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi, Yang Mulia, Pak H. Buchari. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Termohon Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021?

8. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saat ini, luring, Agussalim Wahid dan Nurbia. Yang hadir daring, Bapak Iskandar Lembah dan Risvirenoel. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Hadir di sini, kami selaku Tim Advokakasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam

Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021. Hadir saya sendiri, Ahmad Suherman ditemani rekan kami, Hitno Kossi. Hadir juga secara daring Prinsipal kami, Bapak Wakil Bupati, pak ... Calon Wakil Bupati, Bapak Ramli, didampingi oleh Kuasa Hukum, Bapak Muhammad Sattu Pali, dan Feti Anggraeni Dini. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Kami Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang hadir saat ini Kuasa Hukum, Andi Iskandar dan bersama Rusmin H. Hamzah. Terima kasih, Majelis.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021?

18. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. wr .wb

20. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Yang hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Adidas La Tea dan saya, Mochtar Tidore (Koordinator Divisi Hukum Kabupaten Pulau Taliabu). Hadir juga secara daring, Pimpinan Bawaslu Provinsi

Maluku Utara, Pak Dr. Fahrul Abdul Muid dan rekan kami, Lylian, S.Pd.
Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021?

22. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 dari Bawaslu Kota Palu, saya sendiri yang hadir, Ivan Yudharta sebagai Ketua Bawaslu Kota, didampingi oleh Saudara Fadlan (Anggota Bawaslu Kota, Koordiv. Hukum). Untuk yang daring, Pimpinan Bawaslu RI juga hadir, kemudian Ketua Bawaslu Provinsi, dan juga salah satu Anggota Bawaslu Kota Palu, Ibu Munirah. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang saya persilakan KPU Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok jawaban kami, Yang Mulia, karena ada keterbatasan waktu seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi.

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020, jumlah pendudukan Kabupaten Pulau Taliabu adalah 59.507 jiwa.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara saya pandu saja.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait berapa?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.741 suara, Yang Mulia. Itu berarti sekitar 5%, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

5%. Padahal mestinya yang diperbolehkan Pasal 158?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

2%, Yang Mulia, 665 suara.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2%. Berarti anu, ya ... tidak memenuhi Pasal 158.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus kemudian yang berikutnya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Permohonan Pemohon tidak jelas, anggap dibacakan, Yang Mulia?

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, dalil Permohonan yang pertama adalah berhubungan dengan TPS dengan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT, dimana terdapat pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan pada TPS tersebut. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan pemilih atas nama siapa yang dimaksud Pemohon sedang keluar kota untuk bekerja, dan belajar, berkebun, melaut, dan telah meninggal dunia, yang mana hak pilih atas nama pemilih yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, tidak ada yang mengetahui kepada siapa pemilih yang dimaksud oleh Pemohon menentukan pilihan.

Izin, Yang Mulia, ada beberapa TPS yang disebutkan di situ, kalau tidak salah ada 10 TPS, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Karena keterbatasan waktu, pe ... Termohon hendak memberikan sampel untuk 1 TPS saja, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Misal TPS 2 Desa Salati, misalnya, Yang Mulia. Di situ disebutkan oleh Pemohon bahwa ada partisipasi pemilih lebih dari 100%, padahal di dalam tabel 1.4 yang telah diurai oleh Termohon di dalam Jawaban Termohon, di situ diketahui bahwa dari DPT=220, pengguna hak pilih DPT adalah=196, DPTb=10, dan DPPh=0.

Dengan demikian yang menggunakan surat suara adalah ... yang memilih adalah 206 pemilih, Yang Mulia. Dari total surat suara yang diterima adalah 226. Itu berarti bahwa partisipasi pemilih pada TPS

tersebut adalah 93%, Yang Mulia, tidak melebihi 100% sebagaimana dalil Permohonan Pemohon.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, DPTb-nya banyak itu bisa diakomodasikan karena orang yang nyoblos yang sesuai DPT tidak 100%, kan?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau TPS 3 Desa Pencado?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sebentar, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Angka 9.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu contohnya?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sebentar, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, di sini persentasenya sampai 160. Padahal DPT plus 2,5% itu hanya 45.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Desa apa tadi, Yang Mulia?

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Desa Pecando.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pecando, Yang Mulia?

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Halaman 10 angka ... anu ... tabel 1.3 yang angka 9 itu.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatan Taliabu Selatan.

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. TPS Taliabu Selatan. Di situ, Yang Mulia, berdasarkan Form C Hasil KWK, Yang Mulia, DPT adalah 75. Pengguna hak pilih DPT=66. Pengguna hak pilih DPTb=0. Pengguna hak pilih DPPH=6, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Langsung saja (...)

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-1 ... 15, Yang Mulia. Jawaban halaman 18.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya bukti T berapa? Halaman (...)

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-15 dan Bukti T-16, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-15, Bukti T-16?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 18 ... TPS ... ha? Ya. He eh. Oke, cukup, Prof?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita ... anu kan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dicek ... kita cek, ya. Terus?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil yang lain?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Termohon (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini tadi (...)

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berkeaan dengan dalil yang mencoblos, kok melebihi 100% (...)

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

100%. Ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda sudah menolak ... anu ... ini, ya (...)

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil ini, ya?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena prinsipnya itu surat suaranya seta ... 100% plus 2,5%?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, benar, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi yang nyoblos melebihi itu dimungkinkan karena tidak semua pemilih yang terdapat (...)

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

DPTb ... memilih (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPTb mencoblos semua?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak semua pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, jadi, tidak menggunakan yang 2,5%, tapi menggunakan yang sisanya saja (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sisa surat suara (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah bisa?

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bisa, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang lain?

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Berikut dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos surat suara dan (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu halaman berapa?

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Halaman 20, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 20.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. Di situ Termohon hendak mencontohkan, misalnya TPS 3 Woyo, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Di situ Pemohon mendalilkan bahwa pada Permohonan halaman 12 huruf i, Desa Woyo TPS 3 mendalilkan surat suara yang dicoblos sebanyak 224 suara, sedangkan C-7 atau sekarang dikenal dengan Formulir C Daftar Hadir, sebanyak 208 pemilih. Hal ini menunjukkan terhadap pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 16 suara, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Jawaban Termohon, selain Pemohon tidak bisa menyebutkan atau menjelaskan siapa saja pemilih atau identitas pemilih yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kabur. Kami juga mengurai tabel 1.16, Yang Mulia. Bahwa di situ DPT adalah 243, Yang Mulia, TPS 3 Desa Woyo.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pengguna hak pilih DPT itu 211, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pengguna hak pilih DPTb=13.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

13.

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Surat suara yang diterima dari 243 ditambah 2,5% adalah 249 surat suara.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Yang digunakan=224 surat suara.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terdiri dari 211 DPT dan 13 DPTb tadi, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, masih sisa itu, ya?

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Masih ada sisa 25 ... sisa=25 surat suara, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus akhirnya suara sah=224 itu?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia, benar. Terdiri dari 211 DPT dan DPTb=13, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan suaranya juga Anda cantumkan di situ, ya, 92 dan 192?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Kami cantumkan, baik.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, menurut Anda yang tidak berhak memilih ... mencoblos itu tidak ada?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus sekarang (...)

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sekarang (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang lain-lain, yang anu contoh, dianggap dibacakan, ya?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Jawabannya sama, Yang Mulia, karena dalilnya juga sama.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Kami minta untuk lanjut ke dalil mengenai terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPH yang tidak berhak memilih, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa mulainya respon Saudara?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Halaman 43, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

43? Sebentar.

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Di situ disebutkan ada beberapa TPS, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPH (...)

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

DPPH yang tidak berhak memilih.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak berhak memilih, gimana ini?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. Tanggapan Termohon di situ adalah Pemohon tidak ... seperti yang sebelumnya, Yang Mulia, jawaban ... Permohonan Pemohon ini tidak menyebutkan pemilih atas nama siapa yang dimaksud Pemohon.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak berhak memilih, namun menggunakan hak pilih, baik sebagai pemilih tambahan maupun pemilih pindahan, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sehubungan asas hukum pembuktian, maka Pemohon wajib membuktikan (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pemilih yang dimaksud Pemohon itu, siapa saja?

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Yang berikut, Yang Mulia. Termohon juga menyebutkan di situ, mohon dianggap dibacakan mengenai ketentuan tentang pemilih DPTb dan DPPh, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sebagai contoh TPS 1 Bobong, misalnya, Yang Mulia, di situ juga sudah telah disebutkan (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 45 itu, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu mohon dianggap dibacakan saja, Yang Mulia, karena Termohon pikir sudah jelas dalam tabel yang diurai, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi tidak benar terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak ikut memilih, ya?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu penjelasannya dari halaman berapa sampai berapa?

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Kecamatan ... ada banyak, Yang Mulia, karena ada banyak TPS, Yang Mulia, diurai satu per satu (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-13 sampai dengan T-51?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Berikut, Yang Mulia, terkait dengan dalil ... terdapat penghilangan suara pemilih yang hadir dan menandatangani C Daftar Hadir DPT, daftar hadir DPPH (...)

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai halaman berapa itu keterangannya?

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sebentar, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Halaman 73, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

73?

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pada dalil ini Pemohon menyebutkan 2 TPS saja, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Yakni TPS 1 Nggele dan TPS 2 Nggele, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya. Di situ diurai dalam tabel 101 untuk ... tabel 1.101 halaman 5 ... halaman 74 untuk TPS 1 Nggele, Termohon mengurai disitu bahwa pemilih DPT=374, pemilih DPTb=8, totalnya=382, suara sahnya=379, tidak sahnya=3, totalnya=382, jadi sesuai, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Antara pengguna hak pilih dengan total suara sah dan suara tidak sah.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-17 (...)

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Dan T-78.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan T-78, ya?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS 1 Nggele, ya?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nggele dan TPS 2-nya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

TPS 2 Nggele juga diurai dalam ... dijelaskan Termohon dalam bentuk tabel pada tabel 1.103, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekarang politik uang?

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. Untuk politik uang karena yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilihan adalah Bawaslu, Termohon meminta kalau untuk dalil ini nanti (...)

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Bawaslu menjelaskan, ya?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bawaslu menjelaskan. Baik, Yang Mulia (...)

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana politik uang yang dilakukan (...)

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bupati dan Wakil Bupati Calon Nomor Urut 2, ya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia, benar.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Berikut mengenai dalil mutasi PNS (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Anda tahu enggak mengenai adanya politik uang ini?

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak tahu, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak tahu.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Mengenai mutasi PNS pun sama dengan politik uang, Yang Mulia, karena ini berhubungan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Anta ... intimidasi dan ancaman terhadap ASN juga sama, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Khusus untuk tentang ketidaknetralan penyelenggara pilkada dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini gimana ini ketidaknetralan ini?

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia, ada rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Untuk beberapa penyelenggara pemilihan dan itu sudah ditindak lanjuti oleh Termohon, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-85 sampai Bukti T-87, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi itu ada beberapa nama, ya?

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, benar, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi ada laporan ke Bawaslu, terus kemudian Bawaslu sudah menindaklanjuti, ada rekomendasi?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ada rekomendasi, Yang Mulia.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rekomendasinya apa itu? Yang Anda tahu?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu untuk PPS, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Memang tidak netral, ya, di tingkat ... di tingkat KPPS berarti itu?

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Diduga terlibat pada ... sebagai tim sukses, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tim sukses juga, ya?

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Setelah dilakukan klarifikasi oleh Termohon dan memeriksa bukti-bukti, nama-nama penyelenggara pemilihan tersebut yang diduga terlibat tim sukses, itu tidak ada di nama SK yang dimasukkan oleh (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada nama yang disebutkan ini, misalnya Popu sampai Yosita ini?

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tidak sebagai anggota KPPS? Atau anggota KPPS dia itu?

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Mereka anggota KPPS, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tapi nama-nama mereka juga terdaftar tim (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nama sebagai tim ... tim suksesnya enggak ada?

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak ada.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Padahal nama-nama ini dituduh selain sebagai anggota KPPS juga sebagai tim sukses?

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2?

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah di cek di tim sukses, tidak ada nama ini?

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Di cek nama daftar tim sukses yang dimasukkan saat pendaftaran, Yang Mulia, itu tidak ada nama yang bersangkutan (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Itu Buktinya T-85 sampai?

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sampai T-87, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

87, ya. Terus!

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Mengenai dalil terakhir adalah mobilisasi ASN, itu biar Bawaslu yang menanggapi, Yang Mulia. Karena berhubungan dengan fungsi Bawaslu menegakkan hukum pemilihan. Terima kasih, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini nanti Bawaslu. Terus Petitumnya, gimana?

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebelumnya tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk mejatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106 dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1=15.750 suara.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=17.491 suara.

Dengan total jumlah suara sah=33.241 suara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang Mulia? Silakan Prof!

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini tadi kita minta apa ... bukti, ya. Dan ini salah satu yang di sampling kita ambil itu yang TPS 3 Desa Pencado dan didalilkan di situ suara ... surat suara, kemudian DPT tambah 2,5% itu didalilkan 45, ternyata katanya yang memilih itu 72. Jadi ada kelebihan menjadi 160% orang yang ikut memilih. Setelah kita cek di bukti yang ada, yang saksi kedua pasangan calon tanda tangan, ini buktinya.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di C-1 Plano?

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, 1 Plano ini kita ambil acak. Jadi kalau tadi dia menyebut acak di situ, kami juga ngambil acak di sini. Ternyata itu ditandatangani bahwa jumlah surat suara itu adalah 77. Jadi bukan seperti yang ada di sini, ini. Karena saksi 2 pasangan calon tanda tangan. Dari 77 itu, ini apanya ... pemilih perempuannya ... laki-lakinya=43, yang perempuannya=32. Jadi ada 75. Berapa komposisi suaranya juga ada di sini. Pasangan Calon Nomor 1 dapat 34, Pasangan Calon Nomor 1 dapat 38, ada 72. Jadi itu pun ditandatangani dan ini terakhir Formulir C Hasil KWK, persis. Jadi apa namanya ... bukan 45.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil Pemohon di mana itu?

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jadi apa namanya ... ini buktinya. Sementara Pemohon mendalilkan itu bahwa surat suara itu 45, yang memilih=72. Memilihnya sama, tapi surat suara yang berbeda.

Nah, setelah kita cek di sini, ini komposisi surat suaranya. Anda mengatakan itu tuh bukti P-berapa itu, Pemohon?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Di P-2 ... Bukti P-20, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti berapa?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Bukti P-20.

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti P-20.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Bukti P-20, Bukti P-21.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti P-20, Bukti P-21 kita cek. Bisa diteruskan dulu Prof. Nanti kita akan ... silakan!

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti itu dicek antara bukti Pemohon dan bukti ... itu punya Termohon, ya, Yang Mulia?

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Termohon, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti. Sekarang Pihak Terkait ... punya Pihak Terkait juga sama, ya. Tadi dalil-dalilnya Termohon[Sic!] sudah dijawab oleh Pemohon[Sic!], ada beberapa yang jadi concern yang harus Anda alami, Pihak Terkait.

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Pak Ketua.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah?

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Setelah kita cek bukti dari Pemohon Bukti P-20 itu ternyata sama dengan apa ... angkanya, sama dengan Termohon, ya. Jadi 43, 32, 75, jadi sama komposisinya, ya. Terima kasih, Pak Ketua

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Sekarang, Pihak Terkait ada Eksepsi?

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait ada Eksepsi, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya berkenaan dengan apa, satu?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Satu, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Dianggap dibacakan. Selanjutnya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kemudian tenggang waktu dianggap dibacakan.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kemudian Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Masuk pada Pokok Perkara (...)

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi intinya saya ulangi, pada waktu Legal Standing tidak memenuhi Pasal 158, ya?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus sekarang kita sampai pada dalil-dalil Permohonan Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, bagaimana?

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Dalam Pokok Permohonan poin 6, Yang Mulia. Terlebih dahulu.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Menanggapi Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 21 Desember.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Mengingat tanggal Permohonan Pemohon tanggal 17 itu hanya sebanyak 7 halaman, pada perbaikan bertambah 37, dan totalnya menjadi 44.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Setelah Pemo ... Pihak Terkait membaca dan mencermati antara Permohonan Pemohon tanggal 17 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan tanggal 21 Desember 2020, ternyata di dalam dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, Pemohon telah merubah dan menambahkan dalil-dalil baru yang sebelumnya tidak pernah diuraikan pada Permohonan Pemohon tanggal 17 Desember.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau aturannya gimana?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Gimana, Yang Mulia?

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Aturannya boleh enggak?

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Untuk menambahkan secara substansi, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gini lho, Permohonan awal kapan?

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Permohonan awal tanggal 17 Desember.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

17 itu hari apa?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Hari Kamis kalau saya tidak keliru, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hari Kamis. Terus kemudian (...)

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Perbaikannya (...)

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Boleh melakukan perbaikan, enggak?

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Boleh, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Boleh, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya bagaimana?

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Tanggal 21, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

21 masih memenuhi tenggang waktu enggak?

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Masih, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Kalau dalam perbaikan yang masih memenuhi tenggang waktu boleh mengubah substansi, enggak?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Tidak boleh, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Boleh. Yang tidak boleh adalah perbaikan yang dilakukan di persidangan ini. Lho itu sudah berkali-kali disampaikan di persidangan.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Siap, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini lho, ini teman-teman semua Para Advokat. PMK kita mengatakan permohonan bisa diajukan 3 hari setelah penetapan dan pengumuman yang dilakukan oleh Termohon, itu permohonan awal. Kemudian, boleh memperbaiki perbaikan itu dilakukan 3 hari setelah permohonan awal. Dalam perbaikan itu, yang memenuhi 3 hari itu, bisa dilakukan 1, 2, 3 kali, tapi yang dilakukan ... dipakai adalah perbaikan pertama. Dalam perbaikan pertama itu, boleh mengubah substansi. Dalam perbaikan yang mengubah substansi, boleh berubah semuanya, tapi kemudian itulah yang dipakai untuk persidangan ini. Tetapi dalam persidangan, dalam PMK dikatakan masih boleh mengubah, memperbaiki hanya typo-nya saja. Jadi perbaikan yang pertama itu enggak ada masalah, ini supaya diketahui, ya. Pelajari yang baik PMK kita.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini hanya untuk mempertegas, jadi Anda salah untuk mengerti PMK ini Pihak Terkait.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Sekarang masuk ke poin 11, Yang Mulia, halaman 15. Dalil Permohonan ... Pokok Permohonan Pemohon poin 8 halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi di

beberapa TPS dengan partisipasi melebihi 100% antara lain pada kolom, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Di TPS 2 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat, dimana jumlah surat suara sebanyak 226 dan partisipasi sebanyak 225 pemilih.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sama dengan jawaban Termohon?

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, sama, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan Termohon, itu sampai halaman berapa?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Sampai halaman 23, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

23. Ya, terus dilanjutkan.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kemudian masuk lagi pada dalil Pokok Permohonan Pemohon poin 9, halaman 11, yang menyatakan pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos surat suara, antara lain pada TPS 3 Desa Woyo dalam kolom, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu semua sama dengan apa yang disampaikan Termohon?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Secara prinsip sama, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya. Dianggap dibacakan.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Dianggap dibacakan.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus sampai halaman berapa?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Halaman 57, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang 57. Baik, 57. Terus sekarang halaman 58.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kemudian halaman 58, poin 13. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon poin 10, halaman 19, yang menyatakan adanya selisih suara yang dicoblos dengan jumlah pemilih yang ada di dalam

daftar hadir sebagai akibat dari penerbitan suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu yang tujuannya untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan pada TPS-TPS yang ada dalam pemilih tambahan menggunakan suket dimenangkan oleh Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang keliru, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu sama dengan apa yang disampaikan Termohon?

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia. Kami buktikan (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada yang beda dengan yang disampaikan Termohon?

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Pada kolom sebelumnya, Yang Mulia. Contohnya pada poin 2 dalam kolom 3, 4, 7 itu dimenangkan oleh Pihak Pemohon, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon. Oke.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kemudian dalam Pokok Permohonan poin 11, halaman 19 sampai dengan halaman 27, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dalam DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih, salah satunya pada TPS 1 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, telah ditemukan adanya pemilih yang tercatat dalam DPTb sebanyak 30 dan DPPh sebanyak 7 orang yang kesemuanya bukanlah warga yang berhak memilih pada TPS tersebut. Bantahan Pihak Terkait dalam kolom. Bahwa dalam ... bahwa dalil tersebut merupakan dalil keliru dan patut untuk ditolak, mengingat bukti Form C Hasil Salinan KWK yang dimiliki Pihak Terkait pada TPS dimaksud jumlah DPT sebanyak 220 ... 278, DPPh sebanyak 7, DPTb=30. Sedangkan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 209, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 7, dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 30.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Pada saat proses penghitungan suara di TPS tersebut, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, serta tidak ada temuan dan laporan Bawaslu.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang halaman 104 itu, sudah. Yang lain tadi sudah dianggap dibacakan.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Siap, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Masuk ke halaman 93, Yang Mulia

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

93, oke. Kemudian 96, Yang Mulia.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Sekarang yang dalil lain yang berkenaan dengan (...)

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Dalil lain yang 96 ini terkait dengan money politics, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, money politics nanti dijawab oleh anu ... Bawaslu, bagaimana. Anda melakukan money politics, enggak?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Tidak, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada laporan ke Bawaslu?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ada, Yang Mulia.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus bagaimana prosesnya (...)

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Terhadap laporan tersebut ada beberapa laporan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, ada juga yang hasilnya peristiwa tersebut dianggap bukan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan ada juga peristiwa yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak ada temuan maupun laporan dari Bawaslu, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Bawaslu nanti betul enggak itu yang disampaikan Pihak Terkait. Sekarang 104, ASN yang tidak netral itu bagaimana?

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

104. Terkait dengan ASN poin 41. Keterlibatan KPPS di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. Perlu Pihak Terkait terangkan, terhadap nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon, benar, Tim Pihak Terkait pernah mencatut nama-nama tersebut sebagai relawan simpatisan Paslon Nomor Urut 2, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah yang bersangkutan mengetahui namanya dicatut, yang bersangkutan melakukan konfirmasi ke Tim Pihak Terkait, dan meminta agar tidak dicatut sebagai simpatisan relawan Pihak Terkait, mengingat yang bersangkutan adalah penyelenggara pemilu. Dan atas konfirmasi tersebut, Tim Pemenang Pihak Terkait telah mengeluarkan nama-nama tersebut sebagai simpatisan relawan Paslon Nomor Urut 2.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sejak kapan itu dikeluarkan? Setelah penceblosan atau sebelum? Jauh?

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Sebelum, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu kampanye sudah di (...)

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Sebelum, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum?

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Sudah ada di situ buktinya juga, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus berikutnya?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Terkait dengan (...)

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Aparat desa, ASN itu, gimana?

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Kalau mobilisasi keberpihakan aparatur sipil negara di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, untuk itu Tim Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui karena terhadap nama-nama tersebut, baik dari Pihak Terkait, maupun tim, tidak ada mencantumkan nama mereka dan juga tidak mengetahui nama-nama mereka, Yang Mulia.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. sekarang Petitum kalau begitu.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Petitum. Berdasarkan uraian Keterangan Pihak Terkait di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 16.32 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup, Prof? Yang Mulia? Cukup. Ya, terima kasih.

Sekarang ke Bawaslu, ya. Bawaslu saya ... Anda buat ringkasan laporang enggak? Enggak ada?

366. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Izin, Yang Mulia. Ada buat, tapi cuma buat kami biar untuk baca.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang akan Anda sampaikan berapa halaman itu?

368. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Yang kami sampaikan dalam bentuk tabel, jadi dia sekitar 9 halaman.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

9 halaman kebanyakan. Saya mau tanyakan saja sekarang yang penting-penting, ya.

370. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena yang berkembang itu apa. Anda ada temuan?

372. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Terkait dengan temuan ada, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa temuannya?

374. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Jadi temuan yang dimasukkan itu rata-rata ASN, itu keterlibatan mereka dalam merespons postingan di media sosial, dan itu kami telah rekomendasikan kepada KSN, dan sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus ada temuan apa lagi? Siapa yang menemukan ini di media sosial?

376. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Kalau di media sosial itu rata-rata yang menemukan itu pengawas, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus apa lagi temuannya? Tolong dibetulkan pakai masker! Dinaikkan, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup, kalau mau matanya tertutup juga bolehlah, silakan!

378. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Selain itu, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

380. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ada satu temuan, yaitu keter ... keterlibatan kepala ... salah satu kepala desa di Taliabu Timur Selatan.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

382. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Kepala Desa Belo. Dan ini juga setelah dijadikan temuan diproses dan sudah sampai pada putusan, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

384. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Saya bacakan di sini, Yang Mulia, izin.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sialakan! Putusannya bagaimana?

386. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Bahwa atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pulau Taliabu dengan Nomor Putusan 18/Pid.Sus dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2020 dengan putusan menyatakan terdakwa Saudari Irma Liambana, Kepala Desa Belo, telah terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai kepala desa dengan secara sengaja membuat tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 dengan ketentuan apabila tersebut ... denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan setelah menetapkan pidana tersebut tidak ... tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 tahun berakhir.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi sudah selesai itu, ya? Sudah dipidana, ya?

388. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus ada laporan? Banyak?

390. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, kalau laporan saya mau menyampaikan terkait dengan money politics yang masuk dalam dalil Pemohon.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Silakan!

392. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Itu terkait dengan potong sapi dan potong babi itu, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada yang potong leher, ya? Ya, potong ... potong sapi dan potong padi? Oh, potong babi.

394. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Baik, Yang Mulia, bahwa Pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran money politics di seluruh desa se-Kabupaten Pulau Taliabu berupa pembagian sapi dan babi. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dari Pemohon.

Dalam Pokok Permohonannya, Termohon[Sic!] dugaan politik uang berupa pembagian sapi, babi sebagaimana dalil Pemohon telah ... setelah itu, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan penyampaian laporan administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan Sidang Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, diputuskan bahwa laporan administrasi pemilihan secara TSM tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, yaitu waktu pelaporan yang sudah melewati waktu penerima laporan dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota sesuai Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 01 ... 01/Reg/L dan seterusnya, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada lain lagi yang penting?

396. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Oh, ada lagi, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

398. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ini terkait dengan mutasi pejabat.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pejabat gimana? Ini laporan, ya?

400. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, ini juga laporan.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

402. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi mutasi atau penggantian pejabat Plt Camat Taliabu Utara bernama Kari Mansyur yang dimutasi ke Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Kami, tanggal 13 tahun 2020, menerima laporan dugaan pelanggaran dengan terlapor Saudara Aliong Mus selaku Bupati Pulau Taliabu terkait dengan penggantian pejabat.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Pulau Taliabu dalam hal dugaan tindak pidana pemilihan berupa pejabat sebagaimana larangan dalam rumusan Pasal 71 ayat (2) juncto Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan bukan ... bukan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena unsur larangan penggantian pejabat yang dimaksud tidak termasuk penggantian pejabat pelaksana tugas atau yang dikecualikan. Pejabat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pengertian *pejabat* dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak termasuk di dalamnya mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta melakukan mutas, rotasi dalam jabatan. Berikut, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ditentukan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila belum dilaksanakan seleksi tersebut, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat dianggap pelaksana tugas dengan mempedomani Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE dan seterusnya tanggal 30 Juli 2019. Penggantian pejabat dalam kategori inilah yang dikecualikan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Cukup, ya?

404. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Bawaslu.
Ada, Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia, Pak Manahan? Cukup.
Baik. Terima kasih, Bawaslu.

406. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Ya, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Taliabu sudah selesai.

Sekarang kita ke Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021, saya persilakan Termohon menyampaikan pokok-pokoknya saja.

408. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Terima kasih, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Eksepsi?

410. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ada, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa saja eksepsinya?

412. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Terkait Kewenangan ... Kewenangan Mahkamah. Bahwa (...)

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

414. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Baik.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, ya.

416. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu menyangkut TSM yang mestinya sudah diselesaikan oleh Bawaslu.

418. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Kedudukan Hukum.

420. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Terkait Kedudukan Hukum, Yang Mulia, kami ingin menegaskan bahwa Pemohon adalah pasangan calon peroleh ... yang memperoleh suara di peringkat ketiga, bukan peringkat kedua.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Per ... selisihnya harusnya berapa?

422. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Selisihnya ... persentase selisih, Yang Mulia, 21,14% (...)

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

424. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Yang seharusnya 1,5%, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus ada lagi mengenai Eksepsi?

426. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Terkait dalil yang obscur, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil ... dalil obscur gimana? Ini karena suara ... apa ... wanita ... perempuan, biar agak lama dikit, ya. Dari kemarin laki terus, kok.

428. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

430. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Saya lanjut, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan yang obscur.

432. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Di angka 6 bahwa Permohonan Pemohon pada angka II huruf p halaman 11, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

434. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Yang menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 402 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas, merupakan da ... merupakan dalil yang tidak jelas karena Termohon adalah KPU Kota Palu, bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dia ... dia ... me ... anu kan ... KPU provinsi ... provinsi, ya?

436. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya, Yang Mulia.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan KPU (...)

438. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Kota Palu.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kota Palu. Jadi, obscur-nya kesalahan ... kesalahan subjek berarti.

440. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

442. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Langsung, Yang Mulia, Pokok Perkara (...)

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pokok Permohonan, ya. Lanjutkan, silakan!

444. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf a halaman 15 sampai dengan halaman 18, yang pada intinya menurut Pemohon adanya kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan Model C Hasil Salinan KWK, yang menurut Pemohon banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah surat suara yang masuk ke TPS, termasuk surat tambahan 2,5% berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak, dan jumlah surat suara yang tidak sah. Sehingga terjadi ketambahan ... terjadi ketambahan, kelebihan, dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C Hasil Salinan KWK yang menurut hitungan Termohon, Yang Mulia, terjadi di 64 TPS.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, diteruskan!

446. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan surat suara di 64 TPS sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan ketambahan dan kekurangan suara untuk masing-masing pasangan calon. Sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing-

masing pasangan calon dalam Model C Hasil KWK di 64 TPS dimaksud, tercatat dengan jelas dan rapi, tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak terdapat keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun pengawas TPS di 64 TPS tersebut pada saat proses penghitungan suara dilakukan. Seluruh saksi pasangan calon di 64 TPS menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-11.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

448. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Lanjut, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus lanjut, silakan!

450. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan atau pem ... pengurangan jumlah surat suara di 64 TPS dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Poin 5, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

452. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf b halaman 18 sampai dengan halaman 21, yang pada intinya menurut Pemohon adanya perubahan kolom Model C Hasil Salinan KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipp-ex dan/atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan Model C Hasil Salinan KWK yang tanpa dilakukan paraf oleh pihak penyelenggara atau Termohon, yang menurut kami berdasarkan dalil Pemohon, Yang Mulia, itu di 61 TPS (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

454. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Baik.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sampai Bukti T-21, ya?

456. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bukti T-19 (...)

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-19, Bukti T-20, ya?

458. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya, Yang Mulia.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai Bukti T-20 (...)

460. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bukti T-12 sampai Bukti T-19, Yang Mulia (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang angka 6, halaman 21 itu angka 6?

462. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Angka 6 bahwa terkait dengan Pokok Permohonan angka 5 huruf c halaman 22 sampai dengan halaman 25, yang pada intinya menurut Pemohon tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pungutan suara kepada pemilih Model C Pemberitahuan KWK dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu untuk seluruh Kelurahan Donggala Kodi, seluruh TPS, 18 TPS, agar dilakukan pemilihan ulang.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya. Karena fakta yang terjadi, Termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pungutan suara kepada pemilih Kelurahan Donggala Kodi untuk seluruh TPS, 18 TPS, 3 hari sebelum tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-21 dan Bukti T-22).

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kesimpulannya di bawah itu, yang halaman 22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 itu?

464. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Baka ... bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020, maka dalil Pemohon bukanlah permasalahan yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa begitu?

466. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Karena tanpa C pemberitahuan pemilih dapat (...)

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya?

468. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia, dengan menggunakan e-KTP.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, sekarang nomor 7?

470. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf d halaman 25 sampai dengan halaman 26, yang pada intinya menurut Pemohon adanya perlakuan diskriminasi oleh Termohon terhadap

Pemohon serta ketidaksiapan penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan di wilayah Kota Palu.

Bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih Model C Daftar Hadir Pemilih KWK di sebagian wilayah KPPS Kelurahan Tawanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan faktanya daftar hadir pemilih Model C Daftar Hadir Pemilih KWK telah terdistribusikan dan digunakan di TPS pada hari pemungutan suara, tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-23).

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Selanjutnya?

472. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa mengenai dalil kotak suara yang dibuka segelnya yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Mamboro adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh Pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang, sebab peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilihan, baik Undang-Undang maupun aturan KPU tidak mengatur terkait proses ... proses pemilihan ulang.

Pemohon juga tidak menegaskan jika kotak yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, lagi pula segel yang terbuka tidaklah memengaruhi keutuhan isi kotak suara, sebab kotak suara tetap dalam kondisi terkunci oleh kabel ties berlogo KPU.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, yang terakhir, bawahnya itu?

474. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom Pasangan Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada TPS berapa dan di wilayah mana.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang lain dianggap dibacakan, ya, angka 8.

476. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Baik, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitumnya?

478. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bahwa atas dasar jawaban dan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon yang telah Termohon uraikan, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan yang teregis ... teregister dengan Nomor Perkara 94/PHP.KOT-XIX/2021 untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-KPT/7271/KPU-KOT/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, ditetapkan pukul 15.12 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Aristan (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perolehan suaranya, nama-namanya enggak usah disebut.

480. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Perolehan=28.385.

Pasangan Calon Nomor Urut 2=64.249.

Pasangan Calon Nomor Urut 3=30.372.

Pasangan Calon Nomor Urut 4=37.260.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Termohon.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Silakan!

482. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang membacakan ... sebentar ini Kuasa Hukum atau KPU?

483. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Prinsipal, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, Prinsipal.

485. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Kuasa Hukum kami berhalangan hadir karena hasil rapid di bawah.

486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, satu.

Yang kedua, ini saya menemukan juga yang aneh, kata *ketambahan* itu. Saya cek-cek tadi rupanya memang ada Bahasa Indonesia *ketambahan*, ya. Karena padanannya ke ... pengurangan, gitu, ya. Nanti ini apa? Tapi yang paling penting gini, kan tadi dita ... ditegaskan bahwa 64 TPS yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar karena semua saksi paslon menandatangani di tingkat TPS, begitu, ya Bu, ya?

487. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Benar, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di bukti berapa di ... dimajukan?

489. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Di Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-2 ... Bukti T-11, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukti T-5.

491. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Bukti T-11.

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai Bukti T-11. Jadi 64 TPS itu di buktinya Bukti T-5 sampai Bukti T-11?

493. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah lengkap, ya?

495. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Insya Allah lengkap, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti kita cek. Nanti kalau ada yang apa ... kita konfirmasi lagi, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia Pak Manahan, cukup?
KPU, saya akan anu gini, yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan di Mahkamah Konstitusi itu apa?

498. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

SK, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT

SK apa?

500. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang ... sekarang kalau begitu yang jadi subjek itu apa?

502. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

KPU, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU di mana pilkada itu dilakukan?

504. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini di dalam Permohonan Pemohon di halaman 12, betul Pemohon yang menjadi subjek yang digugat itu KPU provinsi?

506. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba Anda bacakan itu. Berarti ada kesalahan subjek, ya.

508. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba dibacakan. Ini baru menarik ini untuk yang didalami ini.

510. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Halaman 11, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

512. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Permohonan Pemohon. Se ... menyatakan (...)

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... 6 itu di halaman anu ... halaman 6?

514. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Halaman ... halaman 12 poin 6, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, he eh.

516. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, coba dibacakan.

518. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Kami mengutip bahasa dari Permohonan itu.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

520. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Berda ... bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk

mengajukan permohonan pembatalan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 402/PL dan seterusnya, Yang Mulia.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

522. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi dia menyebutnya bukan KPU kota?

524. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul begitu?

526. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi KPU provinsi?

528. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau nomor objeknya, 402 itu putusan tentang apa?

530. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Keputusan kot ... KPU Kota Palu, Yang Mulia. Tentang (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kota Palu, ya?

532. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Ya.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, terima kasih.
Sekarang berikutnya dari Pihak Terkait.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan (...)

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya. Yang pokok-pokoknya saja yang tegas, seperti Ibu siapa ini namanya tadi?

536. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Nurbia, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bu Nurbia itu, ya.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Ya, dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah, menurut Pihak Terkait pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak terpaut dengan perselisihan hasil suara.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Yang kedua, terkait dengan Legal Standing Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ambang batas, yaitu 1,5% sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dimana agregat perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait ... mohon izin renvoi, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Di halaman 10 poin 6.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Maksudnya suara ... perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bukan ... bukan Termohon.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon dengan Pihak Terkait?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang angka 6 itu, ya?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Siap.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini sudah tebal, salah gitu, ya.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Siap.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kamu ngetiknya ini kan betul kan? Tapi salah itu, ya.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Yaitu jumlah perbedaannya, yaitu 33.877 suara atau 21,14%.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Wah, lebihnya banyak sekali. Mestinya berapa persen?

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Dimana ... dimana Pemohon ... dimana Pemohon itu memperoleh suara 30.372 suara atau 18,95%, Pihak Terkait memperoleh suara 64.249 suara atau 40,9%.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya tidak memenuhi 158?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Baik.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian yang ketiga!

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Selanjutnya, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon mengandung pertentangan antara objek sengketa, Posita, dan Petitum. Dimana dalam objek sengketa, Pemohon sebutkan dengan jelas bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang langsung saja.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Dalam Petitum, Pemohon memohon ... agak ... dengan amar membatalkan keputusan KPU atau objek sengketa tersebut sedangkan mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sama sekali tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam Posita ... dalam Petitum Permohonannya sebagai salah satu amar putusan untuk ditetapkan.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Pokok Permohonan.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Sekarang dalam Pokok Permohonan. Keterangan Pihak Terkait terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon pada angka IV Pokok Permohonan, poin 1 sampai dengan 4, halaman 12 sampai dengan 15.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Bahwa Keterangan Pihak Terkait terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu tidak ... oleh karena Pihak Terkait telah uraikan pada bagian Eksepsi, sehingga tidak penting

lagi untuk diuraikan pada uraian ini. Apalagi alasan dan dalil Permohonan Pemohon tersebut telah jauh melenceng dari maksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya, terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon pada angka IV Pokok Permohonan poin 4, halaman 14 sampai 15. Menurut Pihak Terkait adalah alasan dan dalil yang mengada-ada, oleh karena sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang telah berlangsung dan diikuti seluruh tahapannya. Menurut faktanya, telah berlangsung sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup baik itu berapa persen? Tahu?
KPU, berapa persen partisipasinya?

566. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

63%, Yang Mulia.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT

63%, ya, terima kasih. Sekarang halaman 18.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Lanjut, Yang Mulia. Dan pada saat dilakukan pemungutan, tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius, yang bersifat sistematis dan masif, yakni yang signifikan dapat memengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Lagi pula, pada faktanya Pemohon tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil Permohonannya tersebut.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Dan yang lebih penting lagi, Yang Mulia. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok-Pokok Permohonannya tersebut adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat TSM dan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Para Pasangan Calon Peserta Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon pada bagian Pokok Permohonan angka IV, poin 5, huruf a, tentang kesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan Model C Hasil Salinan KWK (...)

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Sudah itu.

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Izin, Yang Mulia. Bahwa ... izin kami bacakan ini, Yang Mulia. Bahwa menurut faktanya, khusus dalam pencatatan terhadap jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercatat pada angka 3 dalam Model C Hasil Salinan KWK halaman 1 tersebut adalah sama atau tidak berbeda dengan catatan akumulasi perhitungan jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat dalam angka IV data suara sah, dan tidak sah bagian huruf a data perolehan suara pasangan calon, serta pencatatan yang tercatat dalam bagian uraian huruf d mengenai jumlah suara sah dan tidak sah pada pencatatan Model Hasil Salinan KWK.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang nomor 2, halaman 21 dianggap dibacakan, ya.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Siap, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang angka 3 sekarang.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Izin lanjut, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Angka 3 saja langsung, halaman 22!

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Bahwa terhadap alasan dalil Permohonan Pemohon pada bagian Pokok Permohonan angka IV poin 5, huruf c dan huruf d, sebagaimana diurai dalam halaman 22 sampai dengan halaman 26. Menurut Pihak Terkait, berhubung oleh karena materi muatannya seluruhnya adalah hanya terpaut dengan teknis pelaksana pemungutan suara dan perhitungan suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan, maka tentu akan lebih baik jika pihak penyelenggara pemilihan (...)

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pihak Termohon, ya.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Siap.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekarang Petitum.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Namun pun demikian, menurut Pihak Terkait, keseluruhan uraian alasan dalil Permohonan Perbaikan ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan hasil yang ditetapkan oleh Termohon (...)

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya.

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6 dan seterusnya, tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup, ya. Yang Mulia, cukup? Baik.

Terima kasih, Pihak Terkait Kuasanya.

Sekarang Bawaslu, Anda membuat ringkasannya, ya?

590. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong disampaikan yang pokok-pokoknya saja.

592. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Baik, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Silakan!

594. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, yang disampaikan di sini bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menerangkan soal bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan. Akan tetapi dari semua kecamatan, hanya satu kecamatan atau PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan model ... form model kejadian. Di sini kami menyampaikan bahwa enam kecamatan itu menyera ... apa ... memberikan formulir model kejadian untuk diisi oleh saksi Pemohon.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

596. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Nah, sementara di dua kecamatan, itu tidak ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT

oke.

598. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya. Kemudian yang berikut, Yang Mulia.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

600. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Terkait dengan dalil Pemohon yang menerangkan bahwa terjadi ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C Hasil Salinan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu beserta jajaran bahwa

tidak ditemukan adanya ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C Hasil Salinan pada 64 TPS yang didalilkan Pemohon yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Kota Palu.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

602. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya, kemudian terkait dengan berikut. Dalil Pemohon yang menyampaikan terkait dengan perubahan pencatatan, baik data pengguna hak pilih maupun hasil perolehan suara dalam pencatatan kolom Model C Hasil dengan cara mengganti angka dan kemudian menggunakan tipp-ex. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS dalam proses pemungutan suara di 16 TPS, itu tidak ditemukan adanya perubahan pencatatan. Kemudian, di 13 TPS yang dilakukan perubahan itu dengan melakukan pencoretan ... apa ... garis horizontal, dua garis, kemudian dilakukan paraf.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Paraf.

604. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Nah, kemudian untuk di 31 TPS, ya, berdasarkan hasil pengawasan kami, ya. Itu memang ada kesalahan dalam hal ... apa ... memberi tanda silang, tapi itu dilakukan perbaikan oleh ketua KPPS dan kemudian itu dilakukan paraf.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

606. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Nah, kemudian terkait dengan dalil Pemohon. Bahwasanya Termohon telah menyalahi pendistribusian Model C Pemberitahuan untuk di Kelurahan Donggala Kodi. Nah, berdasarkan hasil pengawasan kami bahwa pendistribusian dilakukan dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember. Jadi, tiga hari sebelum pemungutan suara.

Kemudian, jumlah yang didistribusikan itu berdasarkan jumlah DPT=6.398. Sementara C Pemberitahuan yang didistribusikan=5.568.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

608. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Adapun 830 itu tidak ditemukan pemilih yang bersangkutan dikarenakan telah pindah domisili ataupun telah meninggal dunia.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi anu, ya ... C-6 nya sebetulnya sudah didistribusikan.

610. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Sudah didistribusikan.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang 830 itu karena memang orangnya tidak ada, ya?

612. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya, Yang Mulia.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berikutnya?

614. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan (...)

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perlakuan diskriminasi itu gimana, ada laporan enggak? Ada temuan, enggak?

616. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Tidak ada temuan, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus?

618. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Terkait diskriminasi.
Kemudian, terkait dengan kejadian di TPS 7 Mamboro, Yang Mulia.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

620. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Jadi itu dilakukan perbaikan, jadi hanya jendela plastik. Jadi, plastik yang ada jendela kotak itu yang terbuka.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

622. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya. Tapi tidak ... kabel ties tetap ada. Nah, itu disaksikan oleh pengawas kelurahan maupun pengawas TPS, beserta TNI, Polri yang jaga pada saat itu untuk dilakukan perbaikan (...)

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

624. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Sebelum pemungutan suara.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi tidak ... anu, ya ... belum ... belum terbuka, ya, artinya, ya?

626. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya. Belum terbuka dia, dia cuma sedikit ... terbuka sedikit saja dan itu langsung dilakukan perbaikan.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

628. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya, pada tanggal 8 itu.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada keterangan tambahan apa ini?

630. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Keterangan tambahan kami terkait dengan jumlah C Pemberitahuan yang didistribusikan itu untuk di delapan kecamatan dari jumlah DPT=250.635 itu ada 198.036 yang didistribusikan C Pemberitahuan. Adapun C Pemberitahuan yang tidak ditemukan orang-orangnya atau orang yang telah meninggal dunia atau pindah domisili itu sejumlah 52.599.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

632. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya. Jadi, sudah sebagian besar memang diserahkan kepada pemilih, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi tidak mengurangi hak untuk memilih, ya?

634. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Tidak mengurangi hak untuk memilih.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

636. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Ya. Jadi demikian saja yang kami sampaikan, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

638. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Terima kasih.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi, ada? Cukup, ya. Pak Manahan? Cukup, ya.
Baik, kalau begitu dua perkara ini sudah kita selesaikan.

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ROY MARIANTO BABUTUNG

Yang Mulia, kalau bisa diizinkan Perkara 94/PHP.KOT-XIX/2021, Pemohon.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ROY MARIANTO BABUTUNG

Terkait dari jawaban Termohon, Yang Mulia. Kalau bisa (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak bisa bereaksi.

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ROY MARIANTO BABUTUNG

Bahwa ini kita melihat dalam bukti kita, Yang Mulia. Yang kami persoalkan dalam P-8, dimana jumlah surat suara, salah satu contoh di TPS 1, Yang Mulia. Jumlah surat suara yang didistribusikan ditambah 2,5% itu dengan total 263. Akan tetapi yang digunakan, yang tidak digunakan, dengan surat suara sah itu hanya 263, Yang Mulia (...)

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti kita yang menilai, ya.

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ROY MARIANTO BABUTUNG

Terima kasih, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita bandingkan nanti, bagaimana. Siapa yang benar dari dalil-dalil yang ada, dan jawabannya, dengan bukti-buktinya, ya? Jadi, ini kesempatan dari Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya. Untuk Pemohon sudah tidak perlu menyampaikan lagi.

Baik. Sebelum selesai, saya sahkan buktinya. Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan T-1 sampai T-89?

648. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-65?

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Benar, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-90?

652. BAWASLU: MOCHTAR TIDORE (KAB. PULAU TALIABU)

Benar, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Pihak Terkait, PT-15 pada daftar bukti tertulis *TPS 2 Beringin Jaya*, pada bukti fisik tertulis TPS 2 Desa Bawang. Yang benar adalah bukti fisiknya, ya?

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Ya, Yang Mulia. Di sana itu memang enggak ada namanya Desa Bawang, yang ada Beringin Jaya di sana, Yang Mulia, Dusun Bawang di sana.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu bukti fisik yang salah sebetulnya?

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Penulisannya itu, Yang Mulia, di situ. Cuma ada 2 TPS di sana, Desa Beringin Jaya.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

1 ... TPS 1 Beringin Jaya.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di situ salah tulis, kok desanya Desa Bawang?

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Desa Bawang ... Dusun Bawang, dusun.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dusun Bawang?

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SUHERMAN

Harusnya Dusun Bawang di situ, Yang Mulia, tapi itu sebenarnya TPS 2 Beringin jaya.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Beringin Jaya? Oke. Nanti kita lihat, ya.
Kemudian, Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021, Termohon T-1 sampai dengan T-23, Ibu? Buktinya T-1 sampai dengan T-23?

664. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Siap, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siap untuk betul atau salah?

666. TERMOHON PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: NURBIA

Betul, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-66?

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021: ANDI ISKANDAR

Benar, Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-138?

670. BAWASLU: IVAN YUDHARTA (KOT. PALU)

Benar, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Semuanya sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, perlu saya sampaikan kepada Semua Pihak, hasil persidangan pertama dan kedua sudah selesai. Seluruh anu ... Permohonan, Jawaban, Keterangan Para Pihak akan kita laporkan beserta buktinya, kita laporkan ke Rapat Permusyawarahan Hakim yang

dihadiri 9 orang Hakim Mahkamah untuk diputuskan kelanjutannya. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan dalam sidang pembuktian saksi, atau bukti tambahan lagi, atau cukup selesai pada persidangan ini yang sudah bisa diputus, ya, gitu?

Ada yang akan disampaikan? Nanti akan diberitahukan oleh Kapaniteraan hasil dari Rapat Permusyawarahan Hakim. Cukup? Ini kalau cukup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB

Jakarta, 8 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

